

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh
PIPIEN KHASANAH BIMASTARI AFIATI

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini harus terlihat dari kemampuan keuangan daerah yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan yaitu pembangunan (*development*), pelayanan (*service*) dan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, sedangkan di Kabupaten Lampung selatan tingkat pendapatan daerah relatif tidak cukup stabil dan cenderung berubah-ubah sehingga ini berdampak secara signifikan terhadap pembangunan dan kemajuan Kabupaten Lampung Selatan.

Hasil analisis dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan: (1) Proses implementasi kebijakan pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Lampung Selatan ditentukan oleh beberapa indikator diantaranya (a) Sistem dan prosedur pemungutan Pajak Air Tanah, (b) Aktor dan badan pelaksana, (c) Komunikasi dan koordinasi kegiatan antara pihak wajib pajak dan badan pelaksana, hal ini terlihat secara jelas bahwa pelaksanaan kebijakan organisasi dalam pemungutan Pajak Air Tanah tidak akan terwujud bila tidak didukung oleh sistem yang baik, sumber daya manusia yang profesional, komunikasi dan koordinasi untuk melaksanakan kebijakan pemungutan Pajak Air Tanah. (2) Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah relatif tidak seimbang ini dikarenakan, (a) Masih lemahnya sanksi yang diberikan kepada para wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Air Tanah. (b) Tingkat produktivitas menunjukkan tingkat perkembangan yang belum optimal karena kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD hanya mencapai 16.51% dalam lima tahun terakhir, walaupun ada peningkatan kontribusi pemasukan Pajak Air Tanah dibeberapa tahun terakhir namun hal itu disebabkan oleh rendahnya target pajak dari potensi pajak yang ada. (c) Tingkat kepuasan kerja menunjukkan bahwa profesionalisme pegawai belum mampu dilaksanakan secara optimal yang disebabkan oleh minimnya insentif yang diterima para pegawai dan staf di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan serta masih lamanya penyelesaian pekerjaan yang membutuhkan oleh pegawai dalam memberikan pelayanan kepada para wajib Pajak Air Tanah di Kabupaten Lampung Selatan. (3) Masalah yang mempengaruhi dalam implementasi pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Lampung Selatan yaitu (a) Terbatasnya sarana transportasi untuk melakukan pemungutan Pajak Air Tanah (b) Masih lemahnya profesionalisme pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, (c) Kurang tegasnya aparat dalam pemberian sanksi bagi wajib pajak yang menunggak Pajak Air Tanah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemungutan Pajak Air Tanah